

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia. Secara riil UMKM juga merupakan sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, sebagai informasi jumlah UMKM di Indonesia untuk tahun 2010 mencapai sekitar 53 juta unit usaha yang menyumbangkan sebesar 1.282 triliun rupiah atau 44,58% dari PDB Indonesia. Namun sumbangsi UMKM terhadap PDB memiliki trend penurunan dimana pada tahun 2011 menyumbang sebesar 1.369 triliun rupiah atau 44,43% dan tahun 2012 menjadi 1.504 triliun rupiah atau 42,53% dari PDB Indonesia(bps.go.id).

Permasalahan utama yang sering dijumpai oleh para pengusaha UMKM adalah sulitnya mencari modal kerja maupun investasi untuk pengembangan usahanya. Sebenarnya saat ini sudah cukup banyak lembaga keuangan mikro (LKM) yang menyediakan kredit bagi UMKM, diantaranya adalah koperasi simpan pinjam(KSP), unit simpan pinjam(USP), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), baitul mal wattanwil(BMW), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan kelompok swadaya masyarakat(KSM).

BRI dan BPR juga termasuk kedalam kelompok ini walaupun jumlah unit kerjanya masih relatif sedikit dibandingkan yang lainya tetapi peranya sangat dominan. Ironisnya, BRI dan BPR hingga saat ini belum dapat menjangkau sebagian besar UMKM, sedangkan LKM yang mampu menjangkau justru menghadapi keterbatasan modal (Retnadi, 2007 dalam Tambunan, 2009:19). Hal ini juga diperkuat oleh Direktur BRI Ahmad Baiquni yang menyatakan usaha mikro yang berjumlah 50 juta unit usah, hanya 20 persennya saja yang sudah tersentuh bank”(Gina Nur Maftuhah, Okezone.com). Bahkan perbandingan antara kredit UMKM dengan total kredit perbankan semakin menurun tiap tahunnya, seperti yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Perkembangan baki debit kredit UMKM dan kredit perbankan
(dalam milyar rupiah)

Tahun	Kredit UMKM	Total Kredit perbankan	%
2011	479.886,5	2.259.862,4	21,2
2012	552.226,1	2.778.957,3	19,8
2013	640.034,5	3.382.873,4	18,9

Sumber : www.bi.go.id(data diolah)

Pada tahun 2011 perbandingan penyaluran kredit bila dibandingkan dengan total kredit perbankan adalah sebesar 21,2%, pada tahun 2012 justru menurun menjadi 19,8% dan terus mengalami penurunan pada 2013 menjadi 18,9%.

Untuk itu pemerintah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 mewajibkan bank untuk menyusun dan menyampaikan rencana pemberian kredit atau pembiayaan UMKM dengan memperlihatkan tahapan

pencapaian rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan, yaitu:

- Pada tahun 2013 dan tahun 2014, sesuai kemampuan bank umum;
- Tahun 2015, paling rendah 5% (lima persen);
- Tahun 2016, paling rendah 10% (sepuluh persen);
- Tahun 2017, paling rendah 15% (lima belas persen); dan
- Tahun 2018 dan seterusnya, paling rendah 20% (dua puluh persen).

Sektor UMKM bila dilihat dari pespektif perbankan sesungguhnya memiliki daya tarik tersendiri. Tingginya permintaan dan besarnya potensi pasar merupakan nilai tambah dari sektor UMKM ini. Namun sektor UMKM juga tidak terlepas dari berbagai hambatan-hambatan. Selain masalah permodalan, UMKM juga memiliki berbagai permasalahan lain seperti tidak adanya jaminan (*Collateral*), pengolahan manajemen, pemasaran, lokasi geografis dan alat produksi yang terbatas, hingga permasalahan yang muncul dari pihak bank seperti prosedur dan struktur bank yang tidak sesuai dengan segemen UMKM. Hambatan-hambatan tersebut tentunya akan mengandung risiko.

Kegiatan utama suatu bank adalah menghimpun dana (*funding*) atau mencari dana .dengan cara membeli dari masyarakat dan memutarnya kembali atau dijual dalam bentuk pinjaman dengan istilah kredit (*landing*). Hakekat dari kegiatan kredit adalah debitur diberikan kuasa untuk mengelola asset yang dimiliki keditur/bank dengan keyakinan bahwa debitur mampu mengelola asset yang dipinjamkan tersebut

sebagai sumber investasi atau pembiayaan eksternal untuk meningkatkan kegiatan usaha yang dikelolanya.

Idealnya debitur dan bank sama-sama memiliki informasi yang lengkap tentang usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut, sehingga masing-masing pihak memperoleh gambaran yang utuh menyangkut peluang usaha dan risiko yang dihadapi. Namun dalam prakteknya, debitur lebih menguasai seluk-beluk informasi usaha yang dikelolanya dibandingkan dengan bank sebagai pemilik dana, sehingga bank memiliki risiko yang lebih besar.

Untuk sebagian bank, risiko kredit merupakan risiko terbesar yang dihadapi, karena kredit merupakan sumber utama penghasilan bank. hal serupa juga diungkapkan Crouhy *et al.* (2006:211) yang menyatakan “*Credit risk is not the only risk faced by retail banking, but it is the major financial risk across most lines of retail business*”. Risiko kredit (*credit risk*) didefinisikan sebagai risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya atau risiko dimana debitur tidak dapat membayar kembali hutangnya.

Menurut laporan lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor (S&P) Ratings Services, risiko kredit bermasalah di perbankan tanah air meningkat seiring dengan cepatnya pertumbuhan kredit. S&P juga menyebutkan jumlah portofolio kredit yang terlambat pembayaran di atas 90 hari naik tapi belum menjadi kredit macet dan jumlahnya terus meningkat sejak 2011. Sedangkan lembaga pemeringkat

lainnya yaitu Fitch Ratings mengatakan bahwa pertumbuhan kredit di Indonesia sudah begitu tinggi dalam jangka panjang. Tingginya pertumbuhan kredit yang telah berlangsung dalam 3 tahun terakhir ini akan berisiko pada peningkatan profil kredit bermasalah(Daniel Wesley Rudolf, Metrotvnews.com).

Ini menunjukkan para peminjam jangka panjang mulai mengalami kesulitan dalam pembayaran. Kondisi ini menjadi indikator dari pelemahan prospek pembayaran dari kredit. Hal senada juga diungkapkan Moody's Investors Service yang menyatakan kebijakan otoritas perbankan khususnya yang berkaitan dengan aturan baru mengenai kredit UMKM sebesar 20% akan membawa kredit industri ke perspektif negatif(Daniel Wesley Rudolf, Metrotvnews.com).

Menurut PBI nomor 22/14/PBI/2012, kebijakan kredit UMKM sebesar 20% sebenarnya bertujuan untuk pengembangan UMKM yang selama ini telah menunjukkan peran strategis dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga perlu didukung pengembangannya. Patrick J. Welch dan Gerry F. Welch (2010,123-124) menggambarkan pertumbuhan ekonomi sebagai:

Economic growth means that the economy's full production–full employment level of output grows over time. Achieving economic growth simply, an economy's production levels are based on the number of resources available to it and how those resources are used. Thus, economic growth can occur only if more resources are available or resources are used more efficiently.

Secara umum pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik atau meningkatnya PDB yang dihasilkan suatu perekonomian selama periode tertentu. Nilai PDB Indonesia sendiri terus meningkat setiap tahun, tercatat pada tahun 2011 PDB Indonesia mencapai 2.464 triliun rupiah atau naik menjadi 6,48%, Walaupun terdapat trend penurunan, nilainya tetap stabil dikisaran 6% pada tahun 2012 dengan jumlah 2.618 triliun rupiah atau 6,26% dan tahun 2013 sebesar 2.770 triliun rupiah atau 5,78%(bps.go.id).

Namun kebijakan kredit UMKM sebesar 20% ini juga berpotensi menyebabkan pemberian kredit yang berlebihan (*overlanding*) karena dengan adanya kebijakan tersebut tentunya akan mendorong perbankan untuk terus menyalurkan kredit. Semakin banyak kredit berarti semakin banyak uang yang beredar di masyarakat dan apabila tidak diimbangi dengan produktifitas barang dan jasa tentu dapat menimbulkan inflasi. Secara garis besar inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu. Patrick J. Welch dan Gerry F. Welch (2010,113-118) menyatakan

“Inflation occurs when there is an increase in the general level of prices. It does not mean that prices are high, but rather that they are increasing. Inflation refers to price movements, not price levels.”

“We measure changes in price levels by using a scale called a price index. Price indexes use percentages and provide an easy method to compare and evaluate price changes. “

Inflasi tahunan di Indonesia sendiri mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 3,79% menjadi 4,3% pada tahun 2012 dan naik hampir dua kali lipat pada tahun 2013 menjadi 8,38%(bps.go.id). Patrick J. Welch dan Gerry F. Welch (2010,113) berpendapat “..an inflation rate of 2 or 3 percent a year does not have a problem. But, when prices increase quickly by a large percentage, such as 8 percent to 10 percent or more per year, inflation becomes a serious issue”.

Faktor makroekonomi yang lain seperti pengangguran, suku bunga, nilai tukar mata uang dan yang lainnya tidak digunakan peneliti dalam penelitian ini dikarenakan keterbatasan waktu. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini antara lain yang dilakukan oleh Awojobi *et al.*(2011) dengan judul “*Analysing Risk Management in Banks: Evidence of Bank Efficiency and Macroeconomic Impact*” yang memberikan hasil bahwa efisiensi manajemen risiko perbankan di Nigeria tidak hanya dipengaruhi oleh faktor spesifik bank saja tetapi juga dipengaruhi oleh variabel makro ekonomi.

Juga penelitian yang dilakukan oleh Billy Arma Pratama (2010) dengan judul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan(Studi pada bank umum di Indonesia periode tahun 2005-2009)” yang memberikan hasil bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran

kredit perbankan, sementara suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan variabel pemberian kredit UMKM yang belum banyak digunakan oleh peneliti lain.

Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai hal ini. Maka, penulis mengambil judul **“Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Pemberian Kredit Sektor UMKM Serta Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi (Studi pada kelompok bank umum di Indonesia periode tahun 2011-2013)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana risiko kredit berpengaruh terhadap pemberian kredit UMKM.
2. Bagaimana pemberian kredit UMKM berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Bagaimana pemberian kredit UMKM berpengaruh terhadap inflasi.

1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan

1. Mengetahui bagaimana risiko kredit berpengaruh secara negatif terhadap pemberian kredit UMKM.

2. Mengetahui bagaimana pemberian kredit UMKM berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Mengetahui bagaimana dengan pemberian kredit UMKM berpengaruh secara positif terhadap inflasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan saran serta dijadikan referensi bagi perbankan dalam pemberian kredit UMKM serta peneliti lain yang tertarik untuk mengangkat topik yang serupa dalam penelitian ini.

b. Kegunaan akademis

Dari aspek akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi salah satu sumbangan data empiris pada ekonomi makro dan perbankan.

